

PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI SEKITAR KAWASAN HUTAN GUNUNG RINJANI PULAU LOMBOK

M. Siddik, Amiruddin dan Nuning Juniarsih

Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) to describe behavior of household economy; (2) to analyze factors affecting the behavior of household economy; and (3) to analyze income and outcome of households on basic equilibrium level and on actual equilibrium level. The results of the research showed that the community forest programs (HKm) given to the community living around the forests had opened job opportunities and income sources to the community living around Mount Rinjani Forest, and community incomes were far above basic equilibrium level. Factors which consistently and positively affected the economic behavior of community households were the area of HKm land occupied, the diversity of household works, the access of their villages to the center of economic activities and the area of land they utilized other than HKm land. On the other hand, household incomes from government subsidies (such as BLT and Raskin) and other sources outside the thriving labor tended to make household labors became lazier and poorer, which significantly and negatively affected working time and incomes of households.

Keywords: *economic behavior, poor community, forest area*

PENDAHULUAN

Deforestasi atau semakin menurunnya luas areal dan kualitas sumber daya hutan, telah menyebabkan terjadinya pemanasan global, banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang melanda sebagian besar belahan dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, seringkali dituding sebagai faktor penyebab terjadinya kerusakan sumber daya hutan. Hal ini dapat dipahami karena kelompok masyarakat inilah yang paling banyak dan intens memanfaatkan sumber daya hutan selama ini baik sebagai sumber kehidupan (ekonomi) maupun sebagai wahana untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial budaya.

Berbagai kebijakan dan program pemerintah dan para pihak yang berorientasi pada upaya pelestarian sumber daya hutan dan peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat sekitar hutan, khususnya di kawasan hutan Gunung Rinjani, telah banyak diimplementasikan. Program hutan kemasyarakatan (HKm) yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1998 di Pulau Lombok

sebagai contoh diakui telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Amiruddin, 2005; Faperta Unram, 2007). Tapi bersamaan dengan pelaksanaan HKm tersebut, justru dilaporkan kerusakan sumber daya hutan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program HKm belum mampu memotivasi masyarakat untuk ikut melestarikan sumber daya hutan.

Secara ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui program hutan kemasyarakatan, memang memungkinkan masyarakat melestarikan sumber daya hutan. Namun secara teoritis (lihat Mellor, 1963; Hart, 1978; Halide, 1981) hal tersebut hanya mungkin dan akan berlangsung secara konsisten, bilamana pendapatan masyarakat sudah meningkat sampai di atas garis kemiskinan (*subsistence level*) atau dengan kata lain keseimbangan ekonomi masyarakat sudah berada di atas tingkat keseimbangan dasar (*basic equilibrium*). Tapi bila keseimbangan ekonominya masih di bawah

keseimbangan dasar, maka masyarakat akan berusaha mencari sumber pencaharian lain meskipun dengan upah yang lebih rendah atau resiko yang tinggi termasuk mengeksploitasi sumber daya hutan.

Dari sudut pandang lain, kerusakan sumber daya hutan juga dapat disebabkan oleh perilaku ekonomi masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Hal ini juga sangat tergantung pada pengetahuan, kesempatan, karakter individu, orientasi nilai, dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan semakin terbukanya akses mereka terhadap sumber daya hutan maka justru mempermudah mereka mengeksploitasi sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pola perilaku ekonomi rumah tangga masyarakat hutan tersebut; (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan (3) menggambarkan tingkat keseimbangan ekonomi yang dicapai oleh masyarakat hutan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang didesain dalam bentuk penelitian survei dan diarahkan untuk mendeskripsikan perilaku ekonomi masyarakat hutan di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani. Lokasi penelitian ditetapkan secara *purposive sampling*, yaitu kawasan yang dinilai kritis yang perlu segera mendapat penanganan dilihat dari kondisi fisik kawasan dan kondisi masyarakat yang terdapat di bagian barat, timur, utara, dan selatan kawasan Gunung Rinjani. Di setiap kawasan dipilih satu desa sampel secara *purposive*, yaitu desa yang dinilai memiliki kawasan hutan paling kritis dan masyarakatnya paling miskin, yaitu: (1) Kawasan barat, yaitu Desa Sesaot dan Desa Kekait Kabupaten Lombok Barat, terpilih Desa Sesaot (2) kawasan timur, yaitu Desa Karang Baru, Sapit dan Perigi, Kabupaten Lombok Timur, terpilih Desa Perigi; (3) Kawasan utara, yaitu Desa Senaru

dan Desa Sesait, Kabupaten Lombok Barat, terpilih Desa Senaru; dan (4) Kawasan selatan, yaitu Desa Aik Berik, Lantan dan Desa Setiling, Kabupaten Lombok Tengah, terpilih Desa Setiling.

Objek penelitian adalah masyarakat yang terlibat dalam program hutan kemasyarakatan dan/atau yang memiliki sumber pencaharian utama di dalam kawasan hutan. Penetapan dan pemilihannya dilakukan secara *random sampling*, masing-masing desa sebanyak 30 rumah tangga petani, sehingga jumlah responden seluruhnya 120 orang atau 120 rumah tangga. Untuk mendapatkan informasi yang bersifat umum, dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Di setiap desa ditetapkan 5 orang, terdiri atas Kepala Desa atau yang mewakilinya, tokoh masyarakat atau tokoh adat, pimpinan lembaga pengelola HKM, Petugas Dinas Kehutanan setempat, dan 1 orang yang mewakili petani.

Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengkombinasikan beberapa teknik penelitian secara bersama-sama, yakni: pengamatan lapang (*field observation*), dokumentasi (*documentation*), wawancara terstruktur (*structured interview*), dengan objek penelitian, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan *key informan*, studi pustaka (*literature review*), survei virtual melalui internet, dan dengan melakukan diskusi terfokus secara kelompok (*Focussed Group Discussion = FGD*).

Analisis data diurutkan berdasarkan urutan tujuan penelitian, diantaranya untuk menganalisis perilaku ekonomi rumah tangga dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi rumah tangga dianalisis dengan menggunakan regresi berganda, dan untuk menganalisis tingkat keseimbangan ekonomi rumah tangga dianalisis dengan menggunakan bantuan grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERILAKU EKONOMI RUMAH TANGGA MASYARAKAT HUTAN

Perilaku ekonomi rumah tangga ditelaah dari tiga aspek, yaitu dari alokasi waktu kerja, struktur pendapatan, dan struktur pengeluaran. Ketiga aspek ini mempunyai kaitan satu dengan lainnya. Pengeluaran rumah tangga biasanya ditentukan oleh pendapatannya, pendapatan rumah tangga ditentukan oleh curahan waktu kerjanya, dan curahan waktu kerja ditentukan oleh pengeluarannya, dan seterusnya. Berikut ini merupakan uraian tentang perilaku rumah tangga pada tiga aspek tersebut.

Pola Alokasi Waktu Kerja

Alokasi waktu kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah jam kerja yang dicurahkan oleh anggota rumah tangga untuk tujuan produktif. Bagi masyarakat petani, termasuk masyarakat hutan, pola alokasi waktu kerjanya sangat ditentukan oleh musim. Pada musim hujan rata-rata masyarakat tani sibuk bekerja pada lahan

sawah, baik sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Bekerja pada lahan hutan banyak dilakukan pada musim kemarau sampai awal musim hujan, karena tanaman yang diusahakan di lahan HKm umumnya terdiri dari tanaman tahunan. Pekerjaan yang terus menerus dilakukan sepanjang tahun adalah pemeliharaan ternak, usaha dagang dalam bentuk kios, dan pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan swasta. Tetapi jumlah masyarakat hutan yang bekerja pada dua jenis pekerjaan terakhir sangat terbatas. Pekerjaan yang dipandang mengisi waktu kerja rumah tangga sepanjang tahun adalah pekerjaan di lahan HKm.

Secara keseluruhan, rata-rata waktu kerja rumah tangga masyarakat hutan dari berbagai jenis pekerjaan produktif per tahun adalah sebanyak 2.819 jam. Sebanyak 73,08% dari waktu kerja tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, baik untuk kegiatan usahatani di lahan HKm, lahan milik sendiri, peternakan atau sebagai buruh tani. Sisanya 26,92% (759 jam) dicurahkan untuk kegiatan di luar sektor pertanian, terutama pada usaha jasa, usaha dagang dan sebagai buruh kasar di luar pertanian (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Alokasi Waktu Kerja Rumah Tangga Masyarakat Hutan di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Rinjani Pulau Lombok NTB, tahun 2009 (dalam jam/th)

Jenis Pekerjaan	Kawasan Utara	Kawasan Barat	Kawasan Timur	Kawasan Selatan	Rata-Rata Waktu Kerja	
					Jam/Th	%
1. Sektor Pertanian						
• Usahatani Lhn HKm	646	1.914	659	1.248	1.117	39,63
• Usahatani luar HKm	413	248	1.104	804	642	22,80
• Usaha Ternak	21	-	281	45	87	3,08
• Usaha Ikan	-	-	-	-	-	-
• Buruh Tani	259	137	259	199	213	7,58
Total 1	1.339	2.300	2.303	2.297	2.060	73,08
2. Luar Sektor Pertanian						-
• Usaha Dagang	152	505	4	108	192	6,82
• Usaha Jasa	408	564	258	119	337	11,96
• Industri Kerajinan	95	-	-	44	35	1,23
• Karyawan/Pegawai	157	67	48	-	68	2,41
• Buruh luar Pertanian	115	278	25	88	127	4,50
Total 2	927	1.414	336	358	759	26,92
Total 1 + 2	2.267	3.714	2.638	2.655	2.819	100,00

Hal yang menarik diamati pada Tabel 1 adalah sumbangan lahan HKm dalam memberikan kesempatan kerja pada masyarakat hutan, secara rata-rata paling banyak dibandingkan pada jenis pekerjaan lain, yaitu sebanyak 39,63% atau rata-rata 1.117 jam/tahun. Tapi bila diamati per lokasi, tampaknya masyarakat hutan di kawasan timur Gunung Rinjani memiliki waktu kerja pada lahan HKm lebih rendah dibandingkan pada kegiatan usahatani di luar HKm. Hal ini terkait dengan jenis komoditi yang diusahakan di lahan HKm dominan tanaman pangan semusim, seperti padi dan palawija yang dilakukan secara tidak intensif, tapi secara ekstensif sehingga tidak banyak menyerap waktu kerja; sementara di luar lahan HKm, dalam 3 tahun terakhir rata-rata masyarakat hutan di kawasan itu, mengusahakan tanaman tembakau secara intensif sehingga waktu kerja mereka banyak terserap pada kegiatan tersebut.

Pola dan Struktur Pendapatan Rumah Tangga

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota rumah tangga, maka rumah tangga masyarakat hutan akan berusaha memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari hasil kerja maupun yang berasal dari luar hasil kerja. Pendapatan yang berasal dari hasil kerja biasanya disebut *labor income*. Sedangkan pendapatan yang berasal dari luar hasil kerja disebut *non labor income*. Pendapatan rumah tangga yang berasal dari luar hasil kerja dapat berasal dari *transfer income*, seperti dari pemberian, subsidi, kiriman keluarga dari luar daerah/negeri; dan juga dari *property income*, seperti dari penyewaan aset (tanah, rumah, ternak dll) termasuk dari bunga modal (Shand, 1986).

Setelah dianalisis secara keseluruhan, pendapatan rumah tangga dari hasil kerja maupun dari luar hasil kerja pada tahun 2008/2009 rata-rata berjumlah Rp9.951.000,00. Pendapatan dari hasil kerja yang berasal dari sektor pertanian berjumlah Rp5.932.000,00

(59,61%) dari luar sektor pertanian berjumlah Rp3.244.000,00 (32,60%). Sedangkan yang berasal dari luar hasil kerja yang sebagian besar dari subsidi pemerintah (BLT dan Raskin) rata-rata berjumlah Rp775.000,00 (7,90%) per tahun (lihat Tabel 2)

Memperhatikan proporsi sumbangan masing-masing kegiatan terhadap pendapatan rumah tangga pada Tabel 2 secara umum tampak bahwa kegiatan pada sektor pertanian di luar lahan HKm masih memberikan sumbangan pendapatan lebih besar (25,43%) dibandingkan di lahan hutan (24,85%), meskipun lahan HKm yang dikuasai lebih luas dan waktu kerja yang dicurahkan lebih banyak daripada lahan pertanian di luar lahan HKm. Ini disebabkan karena tanaman yang ada di sebagian besar lahan HKm belum semuanya berproduksi atau berproduksi maksimal, seperti di lahan HKm Senaru sebagian besar tanaman yang ada belum berproduksi termasuk tanaman gaharu yang menjadi tanaman utamanya. Begitu juga di HKm Desa Setiling, tanaman coklat dan kopi baru mulai berproduksi pada tahun 2009, sehingga tingkat produksinya masih rendah. Lebih-lebih di HKm Desa Perigi, lahannya sebagian besar tidak banyak dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan buah-buahan. Berbeda dengan HKm di Desa Sesaot; karena pembukaan lahan HKm di desa ini paling dulu (sejak tahun 1995-1998), maka sebagian besar dari tanaman yang diusahakan sudah berproduksi secara maksimal. Karena itu pendapatan rumah tangga dari lahan HKm di desa ini jauh lebih besar daripada desa-desa lainnya.

Sumber penghasilan masyarakat hutan yang cukup berarti dari sektor pertanian adalah dari kegiatan berburuh tani. Kegiatan ini memberikan sumbangan sebesar 6,37% terhadap pendapatan rumah tangga atau sebesar Rp634.000,00 per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan berburuh tani sudah menjadi pencaharian bagi masyarakat hutan. Kegiatan ini tidak hanya terjadi di luar kawasan hutan, tapi juga di dalam kawasan hutan. Pada saat FGD diinformasikan bahwa tolong menolong dengan tenaga dalam

kegiatan usahatani yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat hutan sejak dulu sudah semakin menghilang di tengah masyarakat. Semua sumbangan tenaga akan diperhitungkan dengan sejumlah uang tertentu yang mereka sudah sepakati terlebih dahulu. Kegiatan tolong menolong hanya berlaku dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan, seperti pesta acara kematian dan sejenisnya. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kemungkinan memperoleh penghasilan semuanya diperhitungkan dengan uang, sehingga masyarakat terkesan semakin komersil. Dari sini maka jelas bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi dan sumber penghasilan bagi masyarakat hutan.

Sementara di luar sektor pertanian, sumber penghasilan rumah tangga paling banyak adalah dari usaha jasa, memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga lebih dari 10 persen yaitu 11,21%. Selanjutnya adalah usaha dagang 7,79%, sebagai pegawai atau karyawan 7,22% dan

sebagai buruh kasar 5,19%. Sedangkan usaha kerajinan dan industri rumah tangga hanya menyumbangkan pendapatan sebesar 1,19% terhadap pendapatan rumah tangga. Rendahnya sumbangan sektor industri dan kerajinan rumah tangga ini menunjukkan bahwa masyarakat hutan belum mampu memanfaatkan potensi dan peluang ekonomi yang mereka miliki. Mereka baru mampu menjual jasa sebagai porter, pengojek, tukang, supir angkutan dan sebagai buruh kasar. Kegiatan ini pun mulai berkembang setelah kawasan hutan banyak dijadikan sebagai objek pariwisata, sehingga sangat tergantung pada kondisi global. Sementara usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat hutan masih terbatas pada usaha kios untuk melayani masyarakat setempat. Meskipun ini terkesan sebagai pekerjaan sampingan dengan skala usaha dan omzet terbatas, tapi karena dilakukan di rumah dan secara terus menerus, maka sumbangannya terhadap pendapatan rumah tangga cukup besar, yaitu sebesar 7,79%.

Tabel 2. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat yang Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Rinjani Pulau Lombok NTB, 2009 (Dalam Rp000/Th)

Jenis Pekerjaan	Kawasan Utara	Kawasan Barat	Kawasan Timur	Kawasan Selatan	Rata-Rata Pendapatan	
					Rp000/th	%
1. Sektor Pertanian						
• Usahatani di HKM	1.593	5.455	817	2.027	2.473	24,85
• Usahatani luar HKM	1.064	1.478	4.040	3.538	2.530	25,43
• Usaha Ternak	47	-	848	283	295	2,96
• Usaha Ikan	-	-	-	-	-	-
• Buruh Tani	536	273	912	816	634	6,37
Total 1	2.746	7.206	6.617	6.664	5.932	59,61
2. Luar Sektor Pertanian						
• Usaha Dagang	618	1.540	43	900	775	7,79
• Usaha Jasa	934	1.950	1.008	569	1.115	11,21
• Industri Kerajinan	370	-	-	103	118	1,19
• Karyawan/Pegawai	1.312	960	600	-	718	7,22
• Buruh luar Pertanian	607	883	167	410	517	5,19
Total 2	3.841	5.333	1.818	1.983	3.244	32,60
3. Dari Luar Curahan TK						
• Raskin	457	91	130	137	204	2,05
• BLT	961	46	340	508	464	4,66
• Kiriman TKI	203	-	83	98	96	0,97
• Lainnya	-	-	40	7	12	0,12
Total 3	1.621	137	594	749	775	7,79
Total Keseluruhan	8.208	12.676	9.028	9.397	9.951	100,00

Struktur Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rutin rumah tangga ditentukan oleh pendapatan rumah tangga dan perilaku konsumtif dari rumah tangga yang bersangkutan. Pengeluaran rumah tangga secara garis besar dapat dipilah menjadi dua, yaitu pengeluaran yang bersifat konsumtif atau habis dan pengeluaran yang bersifat produktif atau tidak habis dan berjangka panjang. Pengeluaran yang bersifat produktif umumnya dikeluarkan apabila sudah terpenuhi pengeluaran yang bersifat konsumtif dan rutin. Pada Tabel 3 hanya disajikan pengeluaran konsumtif rumah tangga yang bersifat rutin.

Bila data pengeluaran rutin rumah tangga pada Tabel 3 dibandingkan dengan data pendapatan pada Tabel 2 maka tampak bahwa pendapatan rumah tangga masih lebih besar daripada pengeluaran rutinnya. Ini artinya masih tersisa pendapatan rumah tangga yang dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga yang bersifat tidak rutin atau bersifat produktif dan berjangka panjang. Sisa pendapatan rumah tangga tersebut adalah sebesar (Rp9.951.000,00 - Rp7.164.000,00) = Rp2.787.000,00 sehingga dari sisa pendapatan ini sebenarnya masyarakat hutan yang menguasai lahan HKm sudah mampu minimal mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangganya bahkan meningkatkannya, meskipun tanpa subsidi dari pemerintah.

Pada Tabel 3 juga ditunjukkan bahwa meskipun struktur pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan dan minuman masih lebih besar dari pengeluaran di luar makanan dan minuman, tapi proporsi pengeluaran untuk bahan makanan dan minuman masih di bawah angka 75%, yaitu sebesar 67,75%. Ini artinya masyarakat hutan sudah berada di atas garis subsisten atau garis kemiskinan (*subsistence level*) karena sudah mampu mengalokasikan pendapatan untuk pengeluaran di luar makanan dan minuman sebesar 32,25%. Akan tetapi bila berpatokan pada standard PBB 1 dolar AS per hari per orang, maka pendapatan rumah tangga ini

masih di bawah garis kemiskinan. Karena bila harga 1 dollar AS sebesar Rp10.000,00 dengan anggota rumah tangga rata-rata sebanyak 3,4 orang, maka garis kemiskinan berdasarkan pendekatan PBB tersebut berada pada pendapatan sebesar Rp12.240.000,00 per tahun. Jika dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar Rp9.951.000,00, maka masyarakat hutan masih tergolong miskin dengan tingkat pencapaian sebesar 81,30% dari standard garis kemiskinan PBB tersebut

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU EKONOMI RUMAH TANGGA MASYARAKAT HUTAN

Hasil analisis regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap perilaku ekonomi rumah tangga, baik terhadap waktu kerja, pendapatan atau pengeluaran rumah tangga. Variabel-variabel tersebut adalah yang terkait dengan karakteristik kepala rumah tangga, yaitu umur (X_5) dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (X_6). Ini artinya bagi rumah tangga yang memiliki kepala rumah tangga berumur masih muda maupun yang sudah tua, berpendidikan atau tidak berpendidikan perilaku ekonomi rumah tangganya tidak menunjukkan perbedaan secara nyata atau signifikan.

Faktor yang secara nyata dan konsisten berpengaruh terhadap perilaku ekonomi rumah tangga baik terhadap waktu kerja, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga adalah luas penguasaan lahan HKm (X_1), keragaman pekerjaan rumah tangga (X_7) dan lokasi atau keterisoliran desa (X_8). Bagi rumah tangga yang menguasai lahan hutan (HKm) lebih luas, curahan waktu kerja, pendapatan dari hasil kerja dan pengeluaran rutin rumah tangganya lebih banyak dan lebih besar dari rumah tangga yang menguasai lahan HKm lebih sempit. Begitu juga semakin beragam pekerjaan rumah tangga, maka alokasi waktu kerja, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangganya juga cenderung semakin banyak

dan semakin besar. Demikian juga, semakin dekat desa tempat tinggal masyarakat hutan dengan pusat perekonomian (Kota Mataram) semakin banyak waktu kerja yang dicurahkan dan semakin besar pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan bahwa luas lahan HKm, keragaman pekerjaan rumah tangga dan lokasi desa tempat tinggal masyarakat hutan dari pusat kegiatan ekonomi dapat menjadi indikator kesejahteraan ekonomi rumah tangga masyarakat hutan.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga adalah adanya penguasaan lahan di luar lahan hutan (X_2). Variabel ini meskipun tidak berpengaruh nyata terhadap waktu kerja, tapi berpengaruh nyata terhadap pendapatan dari hasil kerja dan terhadap pengeluaran konsumtif rumah tangga. Kondisi yang relatif sama juga ditunjukkan

oleh faktor jumlah anggota rumah tangga (X_3), tidak berpengaruh terhadap waktu kerja, tapi berpengaruh positif dan sangat nyata terhadap pengeluaran konsumtif rumah tangga. Faktor yang hanya berpengaruh positif terhadap waktu kerja adalah faktor jumlah tenaga kerja rumah tangga (X_4), tapi tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan maupun pengeluaran rumah tangga. Berbeda dengan faktor pendapatan rumah tangga dari luar hasil kerja yang dominan berasal dari subsidi pemerintah berupa Raskin dan BLT (X_9). Faktor ini menyebabkan tenaga kerja rumah tangga semakin malas bekerja dan mengindikasikan kemiskinan, yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif faktor ini terhadap waktu kerja, terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja, bahkan ada kecenderungannya terhadap pengeluaran konsumtifnya yang bersifat rutin..

Tabel 3. Struktur Pengeluaran Konsumtif Rumah Tangga Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Gunung Rinjai Pulau Lombok, Tahun 2008/2009 (dalam Rp000/th)

Jenis Pekerjaan	Kawasan Utara	Kawasan Barat	Kawasan Timur	Kawasan Selatan	Rata-Rata Pengeluaran	
					Rp000/Th	%
1. Makanan/Minuman						
• Beras+KH lain	1.710	2.719	2.062	2.152	2.161	30,16
• Lauk Pauk	1.498	1.929	1.387	1.381	1.549	21,62
• Buah-buahan	135	112	110	103	115	1,60
• Kopi/Gula/Teh	275	340	376	341	333	4,65
• Mak. Suplemen	214	99	251	285	212	2,96
• Min.Suplemen	12	49	123	187	93	1,29
• Rokok, sirih dll	417	444	303	405	392	5,47
Total 1	4.259	5.692	4.610	4.853	4.854	67,75
2. Luar Makan/Minuman						
• Pakaian	300	562	416	366	411	5,74
• Pendidikan	127	341	816	1.079	591	8,25
• Kesehatan	100	152	160	170	145	2,03
• Rumah/Penerangan	290	285	302	224	275	3,84
• Bahan Bakar	239	253	249	188	232	3,24
• Rekreasi/Transportasi	242	423	286	299	313	4,36
• Komunikasi	449	158	77	166	213	2,97
• Partisipasi Sosial	175	159	90	99	131	1,83
Total 2	1.922	2.333	2.396	2.591	2.310	32,25
Total 1 + 2	6.181	8.025	7.006	7.444	7.164	100,00

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Kerja, Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Masyarakat Hutan, 2009.

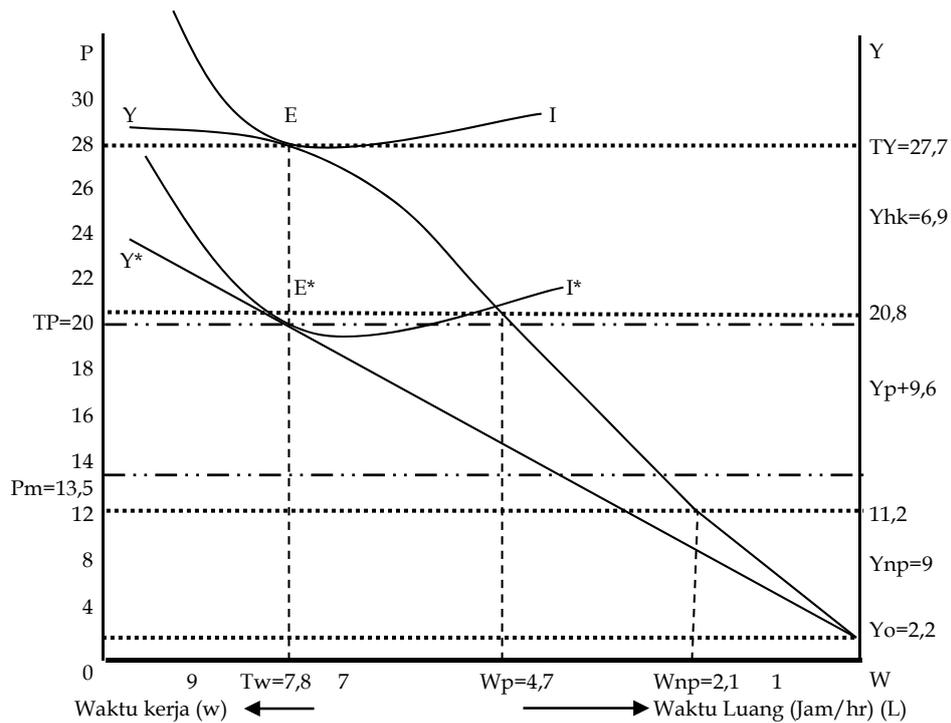
Variabel Bebas (Independent variable)	Koefisien Regresi		
	Waktu Kerja (TW)	Pendapatan RT (TY)	Pengeluaran RT (TP)
Konstanta (a)	2.255,381	1.213,240	3.154,665
Luas lahan HKm (X ₁)	7,075***	43,245***	10,114**
Luas Lahan di Luar HKm (X ₂)	1,219	40,797***	21,397***
Jumlah Anggota RT (X ₃)	-29,914	970,338*	970,956***
Jumlah Tenaga Kerja (X ₄)	715,878***	145,178	-99,018
Pendidikan Kepala RT (X ₅)	24,602	886,185	259,896
Umur Kepala RT (X ₆)	-11,163	48,289	-3,069
Ragam Pekerjaan RT (X ₇)	650,674***	4.367,565***	2.315,987***
Lokasi Desa (X ₈)	-416,774***	-1.734,348***	-988,911***
Pendapatan dari Luar TK (X ₉)	-0,416**	-1,914*	-0,205
Koefisien Determinasi (R ²)	40,60 %	43,20 %	56,90 %

Keterangan : tanda *, **, dan *** menunjukkan tingkat signifikansi pada taraf keyakinan atau kepercayaan 90%, 95% dan 99%.

KESEIMBANGAN EKONOMI RUMAH TANGGA MASYARAKAT HUTAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang perilaku ekonomi masyarakat hutan di atas, bahwa pendapatan rumah tangga lebih tinggi dari pengeluarannya yang bersifat konsumtif dan rutin. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi rumah tangga yang dicapai oleh masyarakat hutan lebih tinggi dari tingkat keseimbangan dasar (*basic equilibrium*). Artinya kehidupan ekonomi masyarakat sudah berada di atas garis subsisten (*subsistence level*) atau garis kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi rumah tangga masyarakat ini sangat ditunjang oleh adanya pendapatan yang berasal dari lahan HKm yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 24,85%. Sehingga meskipun pemerintah tidak memberikan subsidi berupa raskin dan BLT, dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari lahan HKm, masyarakat hutan sudah hidup di atas garis kemiskinan atau di atas tingkat keseimbangan dasar (*basic equilibrium level*). Tapi bila masyarakat tidak diberikan akses untuk menguasai lahan hutan, meskipun tetap diberikan subsidi oleh pemerintah, maka masyarakat hutan masih hidup disekitar garis kemiskinan tersebut, sehingga sedikit saja terjadi gejolak ekonomi akan menyebabkan masyarakat tersebut hidup di bawah garis kemiskinan.

Tingkat keseimbangan dasar masyarakat hutan berada pada tingkat konsumsi sebesar Rp20.000,00/hari, sementara penghasilan dasarnya bila tidak ada lahan HKm dan subsidi pemerintah adalah sebesar Rp18.600,00/hari; berarti masyarakat hutan masih hidup di bawah garis kemiskinan atau di bawah keseimbangan dasar. Dengan adanya subsidi dari pemerintah berupa raskin dan BLT rata-rata sebesar Rp2.200,00/hari, maka pendapatannya meningkat menjadi Rp20.800,00/hari, sehingga pendapatannya sedikit lebih tinggi dari nilai kebutuhan dasarnya. Selanjutnya dengan adanya lahan HKm yang memberikan pendapatan pada masyarakat hutan rata-rata sebesar Rp6.900,00/hari, maka pendapatan rumah tangga meningkat menjadi Rp27.700,00 /hari atau sekitar Rp7.700,00 lebih tinggi dibandingkan kebutuhan dasarnya. Ini berarti kebijakan pemerintah memberikan akses pada masyarakat untuk mengelola lahan hutan telah dapat membantu mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat hutan. Untuk mengilustrasikan tingkat keseimbangan ekonomi yang yang dicapai oleh rumah tangga masyarakat hutan dapat disimak pada Gambar 1.



Keterangan: Y^* garis anggaran atau pengeluaran konsumtif rumah tangga pada tingkat keseimbangan dasar, Y = kurva kemungkinan pendapatan rumah tangga dari hasil kerja; I^* kurva indifferen pada tingkat keseimbangan dasar dan E^* = titik keseimbangan dasar rumah tangga, I kurva indifferen pada tingkat kesimbangan aktual, E = titik kesimbangan aktual yang dicapai oleh masyarakat hutan.

Gambar 1. Keseimbangan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Hutan

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kebijakan pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan melalui program hutan kemasyarakatan (HKm) telah membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani. Dengan adanya lahan HKm, pola dan alokasi waktu kerja masyarakat berjalan sepanjang tahun; pendapatannya masyarakat berada di atas tingkat kebutuhan atau keseimbangan dasar. Rata-rata nilai kebutuhan dasarnya Rp. 20.000,00 per hari; sementara pendapatan yang diperoleh rata-rata sebesar Rp27.800,00 per hari. Sekitar 24,45% atau sebesar Rp6.900,00 pendapatan disumbangkan oleh lahan HKm.
2. Keberadaan lahan HKm telah meningkatkan status ekonomi rumah

tangga masyarakat hutan dari sekitar tingkat keseimbangan dasar (*basic equilibrium level*) yang setara dengan garis kemiskinan ke tingkat keseimbangan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih sejahtera (*higher equilibrium level*).

3. Faktor-faktor yang secara konsisten dan positif mempengaruhi perilaku ekonomi rumah tangga masyarakat hutan adalah luas penguasaan lahan HKm, keberagaman pekerjaan rumah tangga, kedekatan desa tempat tinggal dengan pusat kegiatan ekonomi dan penguasaan lahan pertanian di luar lahan HKm. Sementara pendapatan rumah tangga dari subsidi pemerintah (BLT dan Raskin) justru menyebabkan tenaga kerja rumah tangga semakin malas dan semakin miskin, yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif yang signifikan faktor ini terhadap waktu kerja dan pendapatan rumah tangga.

SARAN

1. Untuk mengatasi lahan hutan yang kritis atau gundul sekaligus mengentaskan kemiskinan di NTB, dapat diterapkan program hutan kemasyarakatan dengan memberikan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan yang ketat agar program HKM itu tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan secara bersama-sama. Dan terhadap program HKM yang sudah berjalan perlu dievaluasi terutama pada lokasi-lokasi yang kurang berhasil seperti di sebagian timur kawasan Gunung Rinjani (Desa Perigi dan sekitarnya), supaya permasalahan yang terjadi bisa cepat diatasi.
2. Subsidi pemerintah kepada masyarakat hutan berupa raskin dan BLT sebaiknya ditinjau kembali dan diarahkan pada perbaikan dan pengadaan infrastruktur ekonomi, karena ternyata program BLT dan Raskin tersebut justru menyebabkan masyarakat semakin malas dan semakin miskin, dan menimbulkan ijon gaya baru dalam masyarakat.
3. Penelitian ini perlu dilanjutkan untuk merumuskan pola pembinaan dan program aksi pemberdayaan masyarakat yang mampu mengakomodir para pihak yang berkepentingan dan dengan pola yang layak dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan dari aspek ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2005. Evaluasi tingkat ketertutupan lahan dan dampak sosial ekonomi program hutan kemasyarakatan di pulau Lombok NTB. *Jurnal Agroteksos* Vol. 15 No. 3: 223-233.
- Kementrian Kehutanan RI. 2006. Rencana pembangunan jangka panjang kehutanan tahun 2006–2025. Jakarta: Pusat Rencana dan Statistik Badan Planologi Kehutanan.
- Evenson et.al. 1980. *Nutrition, work and demographic behaviour in rural Philippine households*. Di dalam: Biswanger et.al. *rural household studies in Asia*. Singapur: Singapore University Press.
- Faperta Unram. 2007. Evaluasi lahan, tanaman, sosial ekonomi dan kelembagaan pada proyek pengembangan gaharu di kawasan hutan pendidikan Senaru kabupaten Lombok Barat. Mataram: Fakultas Pertanian Unram.
- Gawi, Jamal M. 1999. Konsep Pengembangan hutan kemasyarakatan. Seminar dan Lokakarya Pengembangan SDM Hutan Kemasyarakatan, Bogor 7-9 April 1999. <http://jmg64.tripod.com/kpengembangan.hkm.htm>
- Halide. 1981. Pemanfaatan waktu luang rumah tangga petani di DAS Jeneberang Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin Ujung Pandang
- Hairiah K, Sardjono MA, Sabarnudin S. 2003. Pengantar Agroforestry. Bogor: ICRAF.
- Hart RE. 1978. *Allocation strategic in rural Javanese households* [Disertasi]. New York: Cornel University.
- Huxley P. 1999. *Tropical agroforestry*. UK: Blackwell Science Ltd.
- ITTO Kementrian Kehutanan RI. 2001. Mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia: desentralisasi sektor kehutanan (Seri 5 Hasil Laporan Misi Teknis TTO untuk Indonesia). Jakarta. Kementrian Kehutanan RI.
- Koentjaraninggrat. 1984. Masyarakat desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

- Kurada Y, Youtopoulos F. 1980. *Subjective equilibrium model of the agriculture household with demographic behaviour*. Working Paper No. 80-3. FAO/UNFPA.
- Lundgren BO, Raintree JB. 1982. *Sustained agroforestry*. Di dalam: Nestel B (ed). 1982. *Agricultural research for development: potentials and challenges in Asia*. Netherlands: ISNAR The Hague.
- Mellor JW. 1963. *The use and productivity of farm family labor in the early stage of economic development*. *Journal of Farm Economics*, Vol. 45 No. 3: 498-534.
- Nakajima C. 1963. *Subsistence and commercial family farm: some theoretical models of subjective equilibrium*. Di dalam: Wharton J.R. (eds). *Subsistence agriculture and economic development*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Suparmin, Siddik M. 2007. Perubahan keseimbangan ekonomi rumah tangga TKI pria dan TKI wanita di daerah asal pulau Lombok. Mataram: Faperta Unram.
- _____. 2008. Perubahan perilaku dan keseimbangan ekonomi rumah tangga TKI pria dan TKI wanita asal pulau Lombok setelah TKI pulang ke daerah asalnya di pulau Lombok NTB. Mataram: Fakultas Pertanian Unram.
- Reynolds LG. 1978. *Labor economic and labor relation*. New York: Prentice Hall Englewoods Cliffs.
- Siddik M. 1991. Alokasi waktu kerja dan pendapatan rumah tangga petani: studi kasus di empat desa miskin kabupaten Lombok Tengah [Tesis]. Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM.
- Siddik M, Karyadi W, Sukardi. 1999. Studi perubahan perilaku ekonomi rumah tangga petani di kawasan penambangan emas batu hijau kabupaten Sumbawa NTB. Mataram: Fakultas Pertanian Unram.
- Siddik M, Karyadi W, Rakhman A. 2002. Keseimbangan subyektif rumah tangga dengan perempuan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi keluarga: studi kasus rumah tangga perajin tembikar di pulau Lombok NTB. Mataram: Fakultas Pertanian Unram.
- _____. 2006. Perubahan keseimbangan ekonomi rumah tangga pada masyarakat lokal di kawasan tambang PT. Newmont Nusa Tenggara. *Journal Agrimensio*, Vol. 7 No. 2: 134-147.
- _____. 2007. Perkembangan ekonomi rumah tangga petani binaan di kawasan tambang PT. Newmont Nusa Tenggara. *Jurnal Agrimensio*, Vol. 8 No. 1: 145-154.
- Tim PAR Rinjani. 2004. Kaji tindak partisipatif pengelola sumber daya alam di kawasan Rinjani-Lombok-NTB. Mataram: PAR Rinjani.
- Von Maydell HJ. 1986. *Agroforstwirtschaft in den tropen und sub-tropen*. Di dalam: Rehm. S. (Ed). *Grundlagen des pflanzenbaus in den tropen und sub-tropen*: 169-190.. Stuttgart: Eugen Ulmer.

